



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

RENCANA KINERJA TAHUNAN *Tahun 2025*



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|--|-------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan | 100% 90% |
| | | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan | 40% 25% |
| | | c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan | 91% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| | | b. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tambahan | Target |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan | Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan | Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi | 90% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tambahan | Target |
|----|---|---|--------|
| 3. | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal | a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti | 85% |
| | | b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan | 85% |
| 4. | Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset | Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) | 100% |

Jakarta, 17 Januari 2024
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1322/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sakip (Iku 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 Dan Rencana Aksi 2024) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2023

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1222 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023
Tanggal : 20 Desember 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

| NO. | JABATAN | : | NAMA |
|-----|------------------|---|---|
| 1. | Pembina | : | H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. |
| 2. | Penanggung Jawab | : | Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. |
| 3. | Pengarah | : | YUSRAN IBERAHIM, S.H. |
| 4. | Koordinator | : | Drs. MUHIDIN, M.H. |
| 5. | Sekretaris | : | ONO HARYONO, S.E. |
| 6. | Anggota | : | 1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H |
| 7. | Sekretariat | : | 1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E. |

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 152 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/I/2024

PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
(IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024,
RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan.....

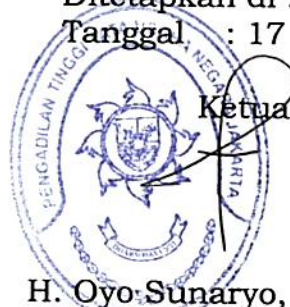
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 DAN RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2024, LKjIP 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 dan Rencana Aksi 2024), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Januari 2024



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,

Kecamatan Menteng

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

Nomor : 149 /KPT.TUN.W2-TUN/ OT.01.1/1/2024

16 Januari 2024

Perihal : Undangan

Kepada Yth : 1. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
2. Panitia dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
4. Para Staf Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
5. PPNPN Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak dalam acara Rapat Penetapan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024

Hari/tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Agenda : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Lt 3 Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


KETUA

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,

Kecamatan Menteng

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 17 Januari 2024
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Aula Lt. 3 Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Acara : Rapat Penetapan Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2024
Peserta Rapat : *Terlampir dalam absensi*

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Keluarga besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Ketua Pengadilan memutuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2024 di Aula Lt 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha ditetapkan dokumen sakisip untuk tahun 2024 yaitu IKU Tahun 2024, LKjIP Tahun 2023, PKT 2024, RKT 2024, RKT 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2024. Semua dokumen sakisip yang disusun berdasarkan aturan baru dan memperhatikan catatan evaluasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan yang diawali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan seterusnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk selalu mempedomani peraturan yang berlaku untuk memudahkan dalam menyusun Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi selanjutnya. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berharap tahun ini dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta satker di bawahnya mendapatkan nilai yang lebih baik dan meningkatkan kualitas kerjanya.

Demikian notulen ini saya buat dan ditanda tangani oleh :

Notulis,

(Sari Meilisna)

NIP. 19900527 202012 2 003

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta,

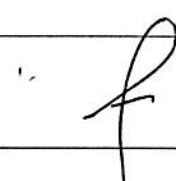




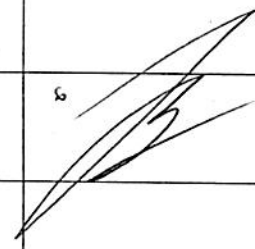

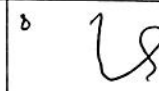


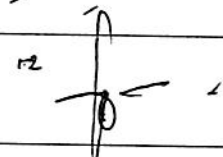

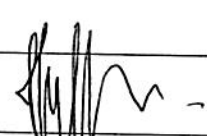
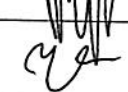

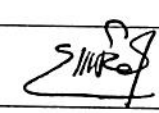
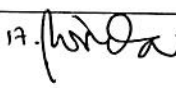





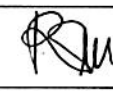


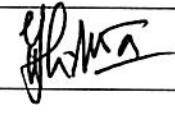

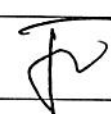



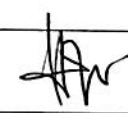


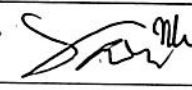
(H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.)
NIP. 19580610 198503 1 001

ABSEN RAPAT
PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024

Tempat : Ruang Aula Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | Byosunaryo | keha | 1. |  |
| 2 | Jambi Sitrus | loahil | | 2.  |
| 3 | WEWES LOUS, STMT. | Wakil tinggi. | 3. |  |
| 4 | M. A. E. J. N. | - - - | |  |
| 5 | A. H. H. A. A. A. | - - - | 5. |  |
| 6 | Boy Mirwan | - | | 6.  |
| 7 | Uday S. | - - - | 7. |  |
| 8 | Nurdiansyah | PP. | | 8.  |
| 9 | DAREL NAPI'S | Panjud Hutan | 9. |  |
| 10 | A Ham R | ka. w. su. RT | | 10.  |
| 11 | Nanang D | PP | 11. |  |
| 12 | Ono Hayonu | Ka. bag. Kp. An | 12. |  |
| 13 | Pakbi | Kasub. repro | 13. |  |
| 14 | Yuliana | PP | | 14.  |
| 15 | Alimuz | PP | 15. |  |
| 16 | Eti Nurneru | PP | | 16.  |
| 17 | Winda | Berahan | 17. |  |

| | | | | | |
|----|---------------|------------------|----|--|---|
| 18 | Dian Widya | APP | | 18 |  |
| 19 | Jarno L | Panmod Bertan | 19 |  | |
| 20 | Farwa | PBMN | | 20 |  |
| 21 | Ruswendah | PP | 21 |  | |
| 22 | DIAN ROSDIANA | OSP | | 22 |  |
| 23 | DIFFI PURI A | PP | 23 |  | |
| 24 | Nitayu M. | OSP | | 24 |  |
| 25 | SUKAGAT | PP | 25 |  | |
| 26 | Firmanyah | APP | | 26 |  |
| 27 | APEY TK | PP | 27 |  | |
| 28 | NURUL F | APP | | 28 |  |
| 29 | IIS - Yulita | Kalub Kew | 29 |  | |
| 30 | Dm Henny | Staf Kenprof | | 30 |  |
| 31 | Meyle | Analisis Reguler | 31 |  | |
| 32 | Parwoto | Staf Kepegawaian | | 32 |  |
| 33 | Soni Melisna | PSD) | 33 |  | |
| 34 | | | | 34 | |
| 35 | | | 35 | | |
| 36 | | | | 36 | |
| 37 | | | 37 | | |
| 38 | | | | 38 | |
| 39 | | | 39 | | |
| 40 | | | | 40 | |
| 41 | | | 41 | | |
| 42 | | | | 42 | |

DOKUMENTASI
RABU, 17 JANUARI 2024







☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com